

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Ekonomi Politik

Pada dewasa ini ketika membicarakan ekonomi dan politik seperti sebuah uang koin yang memiliki dua sisi dan tidak bisa dipisahkan, hal ini karena kita bisa melihat dan mengkaji perbedaan kedua sisi tersebut namun memiliki nilai yang sama dan saling mengikat. Keterkaitan antara ekonomi dan politik sangatlah erat, dimana ekonomi tidak akan memiliki kekuatan (power) jika tidak adanya peran politik untuk mendorong atau mengatur sebuah perekonomian yang kemudian terbentuk adanya kebijakan ekonomi. Kemudian politik tidak akan adanya sebuah kekuasaan berupa jabatan politisi jika tidak adanya ekonomi sebagai jalan atau cara untuk mencapai sebuah kekuasaan.

a. Definisi Ilmu Ekonomi

Kata ekonomi pertama kali ada diciptakan oleh Xeonophon seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Kata Ekonomi sendiri berasal dari dua suku kata Yunani yaitu **OIKOS** dan **NOMOS**, dimana kata memiliki arti sebagai pengaturan rumah tangga. Dengan demikian bisa di sederhanakan bahwa ekonomi merupakan sebagai kaidah-kaidah aturan-aturan, dan cara pengelolaan tentang rumah tangga (Dinar Muhammad, Hasan Muhammad. 2018:2).

Perkembangan ilmu ekonomi selalu memiliki perkembangan seiring perkembangan waktu, banyak pendapat serta pemikiran para tokoh di dunia yang mengembangkan ilmu ekonomi, seperti:

Prof. DR. J.L Mey JR. dalam (Dinar Muhammad, Hasan Muhammad, 2018:2) mengatakan bahwa Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana usaha manusia mencapai sebuah kemakmuran.

Paul A Samuelson dalam (Ahman Eeng, Rohmana Yana. hal: 1.2) mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan sebuah studi dimana mempelajari dan memahami mengenai kegiatan manusia yang menyangkut mengenai produksi dan transaksi dengan banyak orang. Kemudian ilmu ekonomi mempelajari dan mengatur mengenai perilaku manusia dalam mengatur produksi dan yang dilakukannya.

Ilmu ekonomi memiliki sebuah prinsip dimana dalam melakukan sebuah kegiatan atau tindakan ekonomi yang mana ketika melakukan sebuah produksi dengan modal dan pengorbanan sekecil-kecilnya demi mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini sudah menjadi sebuah kegiatan lumrah yang dilakukan oleh seriap orang dengan tujuan mereka untuk memakmurkan masyarakat atau diri pribadinya. Selain itu ekonomi memiliki pembagain arah di dalamnya, yaitu Ekonomi yaitu ekonomi makro

(ruang lingkup besar) dan ekonomi mikro (ruang lingkup kecil). Hal ini digunakan untuk membedakan antara pendapatan serta kemakmuran bagi setiap masyarakat.

b. Definisi Ilmu Politik

Menurut Miriam Budiardjo (2008:13) ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah sebuah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi untuk mencapai sebuah usaha untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera atau menjadi lebih baik yaitu dengan menggunakan ilmu politik. Politik merupakan usaha untuk menciptakan sebuah peraturan yang bisa diterima oleh Sebagian besar masyarakat untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang lebih harmonis.

Dalam menggapai proses tersebut perlu memiliki sebuah tujuan dan sistem serta cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diarah. Proses tersebut berkaitan dengan kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan public (*public policy*), dan alokasi atau retribusi (*allocation or distribution*).

Pada dewasa ini politik sering kali politik hanya digunakan dalam perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Seperti yang dikatakan oleh Rod Hagwe et.all dalam bukunya Miriam Budiardjo (2008:16) "Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan cara

bagaimana sebuah kelompok dalam mencapai sebuah keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan sebuah perbedaan diantara dianggota-anggota kelompoknya”.

Dari hal itu kemudian terdapat sebuah perbedaan mengenai fokus dan tujuan yang ditinjau dari unsur-unsur sebuah kepernyataan, kemudian disatukan untuk mencapai sebuah tujuan bersama kemudian menjadi pokok pembahasan yang utama dalam sebuah perpolitikan. Pokok dari konsep tersebut yaitu:

1) Negara (*state*)

Negara merupakan sebuah organisasi dalam sebuah wilayah yang didalamnya terdapat suatu kekuasaan mutlak yang harus ditaati oleh setiap manusia yang tinggal di dalamnya. Negara merupakan inti dalam sebuah perpolitikan, dimana negara pasti mempunyai sebuah lembaga untuk mengatur negaranya demi tujuan kesejahteraan rakyatnya.

2) Kekuasaan (*power*)

Kekuasaan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok untuk bisa mengatur dan memengaruhi seseorang atau kelompok lain agar mengikuti keinginan yang akan dituju. Menurut W.A. Robson dalam Mirian Budiardjo (2008: 18)

mengatakan bahwa: “dalam Ilmu Politik mempelajari mengenai kekuasaan dalam negara yang memiliki sifat hakiki, dasar, proses dan hasil tujuan dari keinginan yang dicapai”.

Dari hal itu bisa dilihat inti politik sebagai kekuasaan digunakan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang ada pada sebuah negara, perilaku ini biasanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat.

3) Pengambilan Keputusan (*decision making*)

Pengambilan keputusan dalam ilmu politik merupakan sebuah proses dalam mengambil sebuah pilihan atau keputusan dari konsep pokok sebuah keinginan dan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif bersama dalam sebuah kenegaraan dengan tujuan mengikat seluruh anggota masyarakat. Keputusan-keputusan yang diambil bisa menyangkut pada tujuan atau kebutuhan masyarakat atau sebuah kebijakan yang bermaksud pada pencapaian tujuan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Joy Mitchell pada bukunya *Political Analysis and public Policy* (Miriam Budiardjo, 2008: 20) bahwa: “Politik adalah sebuah

pengambilan keputusan bersama atau kolektif ataupun pembuatan kebijakan umum untuk kepentingan masyarakat dan seluruhnya"

Pengambilan pemilihan keputusan ini seperti menetapkan sebuah kebijakan yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan, kemudian dari pembuatan kebijakan pemerintah ini akan berubah menjadi kebijakan pemerintah.

4) Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan merupakan sebuah kumpulan dari keputusan-keputusan yang dibuat secara kolektif oleh seorang pemimpin atau kelompok demi mencapai sebuah tujuan bersama. Kebijakan bisa disebut sebagai cita-cita sebuah kenegaraan atau rencana yang akan dicapai sebuah negara untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat yang dilindungi oleh pihak berwenang atau pemerintah.

5) Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)

Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan sebuah nilai-nilai atau hasil dari terbentuknya sebuah kebijakan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Pembagian nilai-nilai ini berkaitan pada persetujuan sebuah kebijakan yang dibuat untuk

kemajuan sebuah masyarakat dengan keterikatannya dan tidak bisa disanggah, karena sebuah kebijakan ketika terbentuk merupakan sebuah yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dalam bentuk mencapai sebuah tujuan bersama

c. Hubungan Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik

Dari definisi mengenai ilmu ekonomi dan ilmu politik di atas kita bisa memahami dan mendefinisikan mengenai hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik, dimana ilmu ekonomi memiliki kekuatan untuk mengatur rumah tangga perekonomiannya dengan memiliki kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang bertujuan pada kemakmuran seseorang. Kemudian pada ilmu politik memiliki kekuatan dalam mengatur sistem kenegaraan yang mana terdapat sebuah kekuasaan dalam mengatur kebijakan-kebijakan yang bertujuan pada kemajuan dan kemakmuran bersama.

Disini kita bisa melihat bahwa kedua cabang ilmu tersebut memiliki kekuatan besar yang sama-sama bertujuan untuk mencapai sebuah kemakmuran atau kesejahteraan umum, kedua cabang ilmu tersebut sama-sama dikenal sebagai ilmu sosial yang mana pada penerapannya dan pembentukannya yaitu sebagai penentuan sebuah tujuan dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari hal itulah lahir Ekonomi Politik sebagai penggabungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik.

Ekonomi politik merupakan disiplin ilmu yang mengkaji mengenai persoalan-persoalan yang terjadi pada bidang ekonomi di suatu negara yang diselesaikan dengan menempatkan kekuatan politik di dalamnya sebagai kekuatan pendukung dalam memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada bidang ekonomi (Fahmi Irham, 2013: 20). Kekuatan pendukung yang dimaksudkan adalah cara dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam menentukan cara penyelesaian sebuah masalah, hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang terjadi di bidang ekonomi cenderung berdasarkan efisiensi yang dilakukan untuk seseorang saja, namun dalam bidang politik pengambilan keputusan lebih menekankan kepada pihak antarpelaku politik yang mana bertujuan untuk keputusan bersama. Kemudian politik digunakan sebagai penentu dan pembuat kebijakan-kebijakan yang akan memperkuat bidang ekonomi sebagai kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Oleh karena itu disiplin ilmu ekonomi dan ilmu politik saling berkaitan antara satu sama lain, hal ini dikarenakan pada setiap disiplin ilmu memiliki kebutuhan yang sama demi sama-sama mencapai sebuah tujuan bersama untuk kemakmuran serta kesejahteraan umum, dari situlah lahir disiplin ekonomi politik sebagai cabang ilmu yang mengikat ilmu ekonomi dan politik menjadi sebuah kesatuan yang saling berhubungan

2. Teori Ekonomi Politik Keynesian

Menurut Caporaso dan Levine (1992:100) Ekonomi politik Keynesian (EPK) merupakan sebuah kritik dari perkembangan ekonomi politik klasik/neoklasik yang dimana ekonomi politik keynesian menempatkan dirinya pada regulasi pasar mandiri (*self-regulation market*) yang bisa menjadi jalan bagi kesejahteraan setiap umat manusia. Penganut mazhab keynesian menganggap ketiadaan regulasi yang diciptakan oleh negara bisa menyebabkan terjadinya sebuah eksploitasi terhadap sumber daya produktif masyarakat tertentu.

Ahmad Erani Yustika (2009: 32) mengatakan pendekatan EPK dalam sebuah derajat tertentu menghendaki dan membolehkan adanya peran negara dalam aktivitas ekonomi, hal ini berlaku ketika mekanisme perekonomian pasar tengah mengalami sebuah kegagalan sedangkan ketika mekanisme pasar tidak mengalami sebuah kegagalan, maka negara tidak diizinkan untuk ikut campur atau mengintervensi pasar. Fokus utama pada EPK yaitu terciptanya stabilitas proses produksi dan pertumbuhan (*stability of processes of reproduction and growth*) yang dilakukan oleh kelompok pemodal. Pada hal ini kegiatan produksi dan transaksi yang dipelopori oleh kaum pemodal akan memberikan efek besar pada pendapatan negara dan mempekerjakan masyarakat non-pemilik modal.

Kegagalan pasar yang menjadi permulaan dalam pemikiran dan kepercayaan para penganut mazhab keynesian yaitu berawal dari terjadinya instabilitas sistem kapitalis (perpindahan *output*, investasi, penyediaan

lapangan kerja, dan sistem harga) merupakan sebuah serangkaian yang bakal berujung pada kegagalan pasar, serta mekanisme yang terjadi dari hal tersebut yaitu akan mendatangkan sebuah ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh. Maka dari itu Keynes berpikir bahwa pemerintah memiliki sosok yang bisa diandalkan ketika terjadi sebuah kegagalan dalam pasar, oleh sebab itu pemerintah dibutuhkan sebagai manajer yang kompeten (*competent manager*). Dalam pentingnya pemerintah sebagai sosok yang bisa diandalkan, intervensi pemerintah yang digunakan untuk stabilisasi ekonomi cukup bergerak pada tiga bidang yaitu, memanipulasi permintaan agregat atau kebijakan pajak, memperkuat sektor keuangan, dan stabilisasi pada harga pasar. Itu semua tidak lepas dari memanfaatkan kebijakan fiskal pemerintah untuk stabilisasi ekonomi pasar demi kesejahteraan masyarakat (Yustika, 2009: 39).

Inti dari paham keynestian ini adalah untuk memahami besar dan pentingnya peran pemerintah sebagai pendorong dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun sekarang banyak negara di dunia yang sistem ekonomi yang dianutnya cenderung lebih liberal, khususnya dalam sektor perdagangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak negara menganut sistem ekonomi keynestian sebagai pendorong besar dan motor bagi sistem ekonomi di sektor perdagangan, karena paham dan pemikiran keynestian adalah untuk tidak melepaskan politik di bidang ekonomi (Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, 2018: 315).

3. Relasi Negara dan Petani

Relasi atau hubungan sosial merupakan sebuah timbal balik antara individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain dalam suatu masyarakat dimana satu sama lain saling memengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong satu sama lain (Putra, 2002: 39).

Konsep relasi itu sendiri sama halnya seperti hubungan Relasi Negara dan Petani. Negara merupakan sebuah kelompok dalam sebuah tatanan masyarakat yang melakukan interaksi dengan petani dalam hal saling membutuhkan satu lain untuk mencapai sebuah keinginan bersama. Petani membutuhkan pemerintah sebagai fasilitator di sektor pertanian mereka seperti pada pemberian bibit unggul, pupuk, alat pertanian dan penyuluhan dalam pengelolaan pertanian salak untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Dan Negara membutuhkan petani dalam pengelolaan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian agar bisa meningkatkan pendapatan negara sebagai tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat pengangguran di dalam struktur masyarakat.

Peran Negara dalam relasi ini yaitu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para petani dalam pengelolaan sistem pertaniannya. Menurut Harold J. Laski (Budiardjo, 2008:55) mengatakan bahwa Negara harus bisa menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Yang berarti Negara harus ikut campur dalam peningkatan pertanian para petani untuk mencapai sebuah kesejahteraan mereka. Negara yang dimaksud pada pembahasan ini adalah sosok

pemerintah sebagai pengatur dan yang menetapkan sebuah kebijakan. Dalam hal yang diperlukan oleh petani yaitu pemerintah dalam menunjang kebutuhan mereka dalam melakukan kegiatan pertanian seperti pemberian bibit unggul, pupuk, dan alat tani serta alat panen.

Adam Smith (Caporaso dan levine, 2015: 56) menekankan bahwa Negara Negara tidak hanya menjaga ketertiban dalam negara dan memberikan keamanan dari serbuan negara asing, namun negara juga harus memberikan pelayanan publik dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur publik yang tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta. Menurut pemikiran keynesian stabilisasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara menggunakan ekonomi sirkular untuk mengontrol kestabilan ekonomi.

Menurut Keynesian (Caporaso, Levine, 2015: 286) Kestabilan ekonomi sangat mempengaruhi pada kegiatan petani, pembentukan kebijakan pemerintahlah yang bisa membuat stabilisasi ekonomi untuk membantu petani dalam mengelola pertaniannya agar terus berjalan tidak mengalami sebuah kegagalan. Ada 3 titik atau cara yang bisa dilakukan negara atau pemerintah dalam mengontrol kestabilan ekonomi, yaitu dengan cara:

a. Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah menggunakan pendapatannya untuk membeli barang keperluan bagi para petani, menyerap tenaga kerja, memberikan pendapatan konsumen dan terhadap sebuah lembaga

tanpa memperhitungkan lembaga tersebut memberikan sebuah barang atau jasa sebagai sebuah imbalan.

Pada sistem Pemerintah di Desa Cilangkap tidak adanya relasi yang terjadi terkhusus pada pengeluaran untuk bantuan para petani baik dalam pembelian pupuk, alat panen, dan bibit. Pada perjalanannya pemerintah Desa Cilangkap hanya ikut serta satu kali pada awal kemajuan salak manonjaya dipasaran dengan memberikan pelatihan tani untuk para petani agar bisa mendapatkan hasil yang baik, setelah hal itu tidak ada lagi bantuan yang diterima oleh petani dari pemerintah.

b. Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah dilakukan dengan cara pemerintah mengeluarkan surat hutang (*government bond*) yang dapat dibeli oleh siapapun baik itu individu ataupun perusahaan. Pemebelian surat hutang ini oleh sektor swasta dapat menghasilkan pendapatan bagi negara dan dapat digunakan untuk anggaran negara.

Keterlibatan pemerintah pada pembiayaan kebutuhan masyarakat tani sangatlah berpengaruh untuk kemajuan pertaniannya, namun di Desa Cilangkap keterlibatan pemerintah dari pinjaman yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak ada, mayoritas petani di Desa Cilangkap menggunakan modal sendiri pada kebutuhan pertaniannya seperti pembelian pupuk dan bibit, pemerintah Desa Cilangkap seakan-akan tutup mata dan tidak ikut

campur dengan hal itu yang berimbas pada petani semakin lama semakin merosot dalam penjualannya karena kalah unggul dengan salak lain di pasaran yang diakibatkan oleh pemberian pupuk yang kurang pada perkebunannya dikarenakan terpengaruh oleh modal yang dimiliki oleh petani serta tidak adanya bantuan pinjaman modal dari pemerintah.

c. Pajak

Pajak digunakan dalam hal ini yaitu negara dapat mendanai setiap kegiatan-kegiatan mereka tanpa harus meminjam uang kepada sektor manapun, namun negara dapat menggunakan pajak agar mendapatkan pendapatan untuk kembali digunakannya dalam melakukan setiap kegiatan.

Kegiatan pertanian salak di Manonjaya baik dari penjualan dan pembelian tidak memiliki pengawasan yang baik dari pemerintah yang mengakibatkan naik turunnya harga dipasaran, hal ini karena tidak diberlakukannya pajak serta pinjaman yang berikan pemerintah kepada para petani yang kemudian berdampak pada penurunan pendapatan para petani dan menyebabkan banyak petani yang berhenti dalam bidang pertanian salak.

Peran Pemerintah yang dibutuhkan oleh petani sebagai penciptaan kesejahteraan para petani tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nyatanya pemerintah seakan-akan menutup mata dan telinga terhadap hal ini. Dimana banyak terjadi konflik atas Pemerintah dan Petani di Indonesia

seperti pemerintah acuh dalam perkembangan sebuah pertanian kearifan lokal dengan tidak memberikan kebutuhan tani, pemerintah menyokong usaha-usah pemodal besar (swasta), pencabutan dan penggusuran lahan tani dan tidak adanya ketegasan dan terjaminnya hukum petani (Rachman, 2017: 199).

Disamping dari kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kemajuan dan kesejahteraan para petani, di Desa Cilangkap sebagai komoditas pertanian salak peran Negara atau Pemerintah dalam pengelolaan pertanian salak di Desa Cilangkap sangatlah buruk dan tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan para petani seperti pada UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada Pasal 1 Ayat (2) mengatkan bahwa: Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Hal ini dapat dilihat dari kemundurannya pertanian Salak Manonjaya di Desa Cilangkap yang mana sekarang sudah tidak memiliki pamor sebagai buah khas dari Manonjaya di pasaran. Kurang atau terbatasnya campur tangan dari Pemerintah Desa Cilangkap merupakan penyebab dari kemunduran pertanian Salak Manonjaya, Pemerintah Desa Cilangkap seakan acuh terhadap komoditas pertanian salak ini yang merupakan sebuah mata

pencapaian tetap masyarakat di Desa Cilangkap pada masanya dulu. Tidak adanya bantuan subsidi pemerintah seperti, pupuk, bibit, alat tani dan pelatihan dalam pengelolaan pertanian Salak Manonjaya menjadi akar dari semakin menurunnya kualitas dan kuantitas dari Salak Manonjaya tersebut yang kemudian berimbas pada para petani yang mulai sedikit demi sedikit meninggalkan mata pencahariannya sebagai petani salak karena tidak stabilnya harga pasar terhadap penjualan Salak Manonjaya tersebut. Yang mereka dapatkan hanyalah berupa pelatihan penanaman salak yang diberikan oleh pemerintah dan itupun hanya satu kali terjadi pada era pemerintahan Soeharto dan setelah itu tidak ada lagi pelatihan atau pemberdayaan terhadap pertanian salak manonjaya di Desa Cilangkap. Maka dari itu Relasi Negara kepada Petani Salak sangatlah berpengaruh besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, hal ini juga bisa menurunkan tingkat pengangguran di Desa Cilangkap.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah ada dibuat oleh orang lain di suatu daerah dan menjadi sebuah referensi bagi peneliti lain yang melakukan sebuah penelitian dengan fokus dan kajian hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh dirinya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding atau penyama dalam melakukan sebuah penelitian oleh seorang penulis. Pada penelitian ini penulis memasukan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki fokus kajian hampir sama dengan penelitian ini,

penelitian terdahulu yang digunakan yaitu seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

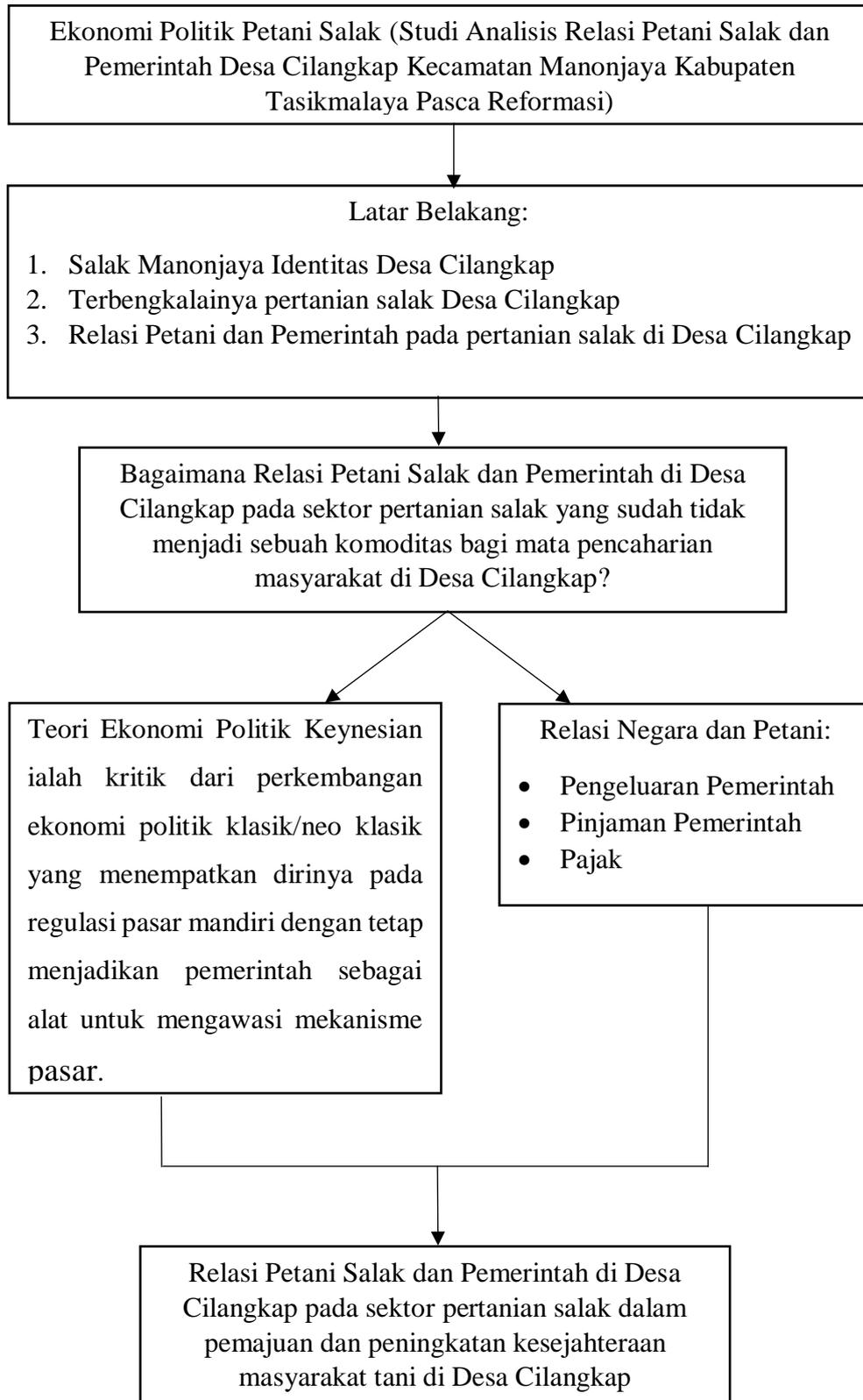
Nama Peneliti	Uraian Penelitian
<p>1. penelitian Siti Aminah (2017) dengan Judul penelitiannya yaitu Negara dan Kesejahteraan (Analisis Ekonomi Politik Terhadap Hubungan Petani dengan PT. Surya Lestari II di Desa Waiputeh Kabupaten Mamuju Tengah).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis. Adapun isi skripsi ini menganalisis mengenai relasi para petani sawit kepada negara dan negara/pemerintah. Dalam hal itu para petani sawit di Desa Waiputeh mengalami kerugian baik dari materil maupun imateril, petani merasa dirugikan oleh PT. Surya Lestari II dengan pengelolaan tanah yang diberikan masyarakat kepada perusahaan swasta tersebut untuk mengelola perkebunan sawit, namun hal itu malah merugikan dengan kenaikan kualitas penerimaan buah dan membuat petani kewalahan dan pencapaiannya yang sering kali tidak bisa mencapai standar kualitas yang ditetapkan perusahaan tersebut. Kemudian truk pengangkut buah yang diberikan untuk kendaraan masyarakat dalam penghubung perusahaan dan pertanian tidak selalu ada yang menyebabkan susah para petani dalam mengantarkan hasil tani mereka. Selain itu harga yang diberikan</p>

	<p>perusahaan tersebut tidak sesuai dengan yang harus petani terima. Dari situlah pemerintah berperan dan ikut andil dalam pengawannya pertanian sawit untuk kesejahteraan para petani dan memberantas kelicikan yang dibuat oleh perusahaan dengan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan penetapan harga yang seharusnya diberikan kepada para petani.</p>
<p>2. Skripsi Endah Hapsari (2016) dengan judul penelitiannya yaitu “Implementasi Pola Kemitraaan Usaha Tani Sawit pada PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Bekri”</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitiannya pada pola kemitraan antara PTPN VII dengan petani sawit, selain itu adapula peran pemerintah yang sangat penting pada pola kemitraan ini, yaitu pemerintah sebagai regulator yaitu dengan membuat surat perjanjian antara pihak PTPN VII dengan petani sawit, kemudian peran pemerintah menjadi fasilitator dengan menjembatani pola kemitraan antara pihak PTPN VII dan petani sawit, dan pemerintah berperan sebagai mediator yang mana pemerintah akan menjadi pihak yang memediasi jika terjadi konflik antara pihak PTPN VII dan petani sawit. Namun pada pelaksanaannya, para petani sawit Sidomulyo belum menunaikan kewajibannya sebagai mitra usaha, hal ini dikarenakan rendahnya</p>

	<p>harga TBS yang di tetapkan oleh PTPN VII sehingga para petani memilih untuk menjual hasil panennya kepada perusahaan lain yang lebih menjamin harga lebih tinggi agar mereka bias menunjang kebutuhan hidup mereka. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan sebagai pihak ketiga dalam pola kemiteraan antara PTPN VII dan petani sawit agar tidak merugikan satu sama lain dan menanggulangi agar tidak terjadinya konflik.</p>
<p>3. Penelitian Indriana Felayani Putri (2019) dengan judul penelitiannya yaitu Ekonomi Politik Tembakau (Peran Pemerintah Terhadap Pertembakauan di Kabupaten Jember)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, fokus penelitian ini yaitu untuk mengkaji peranan pemerintah yang meliputi hulu (on farm) dan hilir (off farm). Pada pelaksanaannya sebagai komoditas sektor pertanian tembakau masih banyak permasalahan mengenai terbatasnya bibit unggul, minimnya subsidi pupuk dan kurang memadainya alat-alat pertanian mereka. Selain itu miminimnya informasi seputar pasar dan tidak adanya payung hukum yang jelas pada pengusaha tembakau menjadi masalah besar yang harus selalu dihadapi. Maka peran pemerintah sangatlah penting pada sektor</p>

	<p>pertanian tembakau ini karena bukan hanya akan berpengaruh kepada perekonomian perusahaan, namun bias berpengaruh kepada masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan sektor pertanian tembakau di Jember merupakan sebuah komoditas besar pada sektor industri dan bisa meningkatkan sumber daya manusia dimana mereka bekerja sebagai buruh perusahaan tembakau.</p>
--	--

C. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Dari kerangka pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Relasi Petani Salak dan Pemerintah di Desa Cilangkap yang ada di Desa Cilangkap. Hal yang melatarbelakangi peneliti dalam penelitian ini yaitu mengenai terbengkalainya lahan pertanian salak di Desa Cilangkap yang mana pertanian ini merupakan sebuah komoditas mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Cilangkap dan merupakan sebuah identitas Desa sebagai penghasil Salak Manonjaya yang menjadi ciri khas sebuah daerah. Maka dari itu peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana Relasi Petani Salak dan Pemerintah di Desa Cilangkap yang terjadi pada sektor pertanian salak yang sudah tidak menjadi sebuah komoditas bagi mata pencaharian masyarakat di Desa Cilangkap, karena hal ini menjadi sebuah permasalahan yang harus dikahi dan diteliti, apalagi mengenai peran Pemerintah Desa sebagai aparatur Negara yang bertugas dalam mensejahterakan masyarakat dan menjadi kunci dalam kemajuan pembangunan sebuah desa.

Dalam penelitian ini Teori Ekonomi Keynesia menjadi landasan peneliti untuk mengkaji dan meneliti permasalahan yang terjadi di Desa Cilangkap mengenai Relasi Petani Salak dan Pemerintah Desa Cilangkap, hal yang mendasari penggunaan Teori ini yaitu karena dalam Teori Ekonomi Keynesian menempatkan dirinya pada regulasi pasar mandiri (*self-regulation market*) yang bisa menjadi jalan bagi kesejahteraan setiap umat manusia. Namun keadaan pasar tidak selamanya mengalami sebuah kenaikan tetapi juga bisa mengalami sebuah penurunan, maka dalam sebuah derajat tertentu menghendaki dan

membolehkan adanya peran negara dalam aktivitas ekonomi, hal ini berlaku ketika mekanisme perekonomian pasar tengah mengalami sebuah kegagalan sedangkan ketika mekanisme pasar tidak mengalami sebuah kegagalan, maka negara tidak diizinkan untuk ikut campur atau mengintervensi pasar. Selain itu untuk meninjau peran relasi negara terhadap petani salak sudah sejauh mana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang bergelut di bidang pertanian. Yang kemudian diharapkan mendapatkan sebuah hasil dari penelitian ini mengenai Relasi Petani Salak dan Pemerintah di Desa Cilangkap di bidang pertanian salak dalam peranan pemerintah desa dalam kemajuan dan peningkatan kesejahteraan para petani salak di Desa Cilangkap